



RENCANA KERJA 2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renja tahun 2026, disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Renja disusun secara partisipatif dan melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan, sehingga Renja ini dapat disusun dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Oleh karena itu, semua komponen unit kerja internal harus berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya indikator kinerja program kegiatan serta tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Semoga apa yang kita harapkan kedepan terkait urusan PPPA dan Dalduk KB, dapat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan perempuan dan anak pada khususnya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra/ Ema Rachmawati, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026.

Semarang, November 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian ... Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	49
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.	53
4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah TA 2026. ...	100
4.3. Dukungan Terhadap 136 Program Daerah	107
BAB V PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	12
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	29
Tabel 2. 3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	41
Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	44
Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	51
Tabel 4. 1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah	57
Tabel 4. 2 <i>Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran/Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....</i>	101
Tabel 4. 3 Dukungan Tahapan 136 Program Daerah Tahun 2026	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
--------------------	---	----------

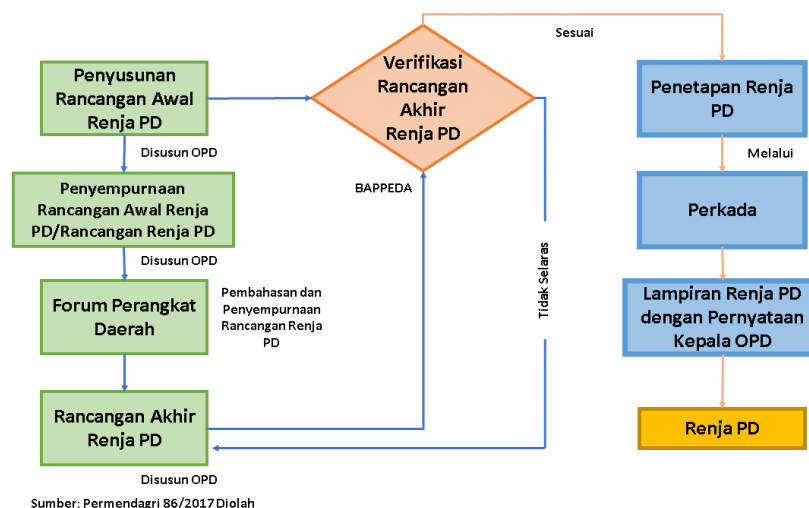
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) tahun 2026 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025 – 2029, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai upaya memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat/stakeholder terkait.

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum OPD dan Penetapan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut :

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama

- Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 22. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 23. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 24. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (6/85/2017) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-12/2018) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);
 29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2021 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-2/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (2-54/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
 31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-56/2022), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
 37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak;
 39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 51);

40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Satu Data Jawa Tengah;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah penampungan Sementara bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 33);
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24).
46. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045;
47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
48. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
49. Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

50. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
51. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/15/2025 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD DAN RBA-RSD Tahun Anggaran 2026;
52. Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor : S/000.7.2.5/509/2025 Tahun 2025 Tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun.
2. Sebagai alat untuk menyelaraskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Perangkat Daerah

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 serta kaitannya dengan capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis laporan kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian ringkas tentang rumusan program dan kegiatan perangkat daerah, indikator kinerja dan kelompok sasaran pencapaian Renja Perangkat Daerah dan pendanaan indikatif beserta sumbernya tahun 2026 serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tahun 2027.

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan Kinerja dapat dilihat dari realisasi capaian program dan kegiatan yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus di evaluasi secara berkala dan menyeluruh.

Pagu Anggaran yang dikelola oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.25.414.825.000,- sedangkan prosentase penggunaan anggaran belanja di Tahun 2024 sebesar 97,62% atau sebesar Rp.21.882.164.193,- dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Dengan gambaran kinerja Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Dari 15 indikator program semua indikator program mencapai target kinerja. Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 36 indikator kegiatan semua indikator memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
2. Realisasi progam/kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : sebanyak 15 indikator program yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yaitu :
 - a) Sebanyak 3 indikator program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah dan Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat dengan tingkat capaian 100%;
 - b) Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan tercapai 80% dari target 60% dengan tingkat capaian 133,33%;
 - c) Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar tercapai 28,57% dari target 11% dengan tingkat capaian 259,73%;

- d) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani tercapai 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%;
- e) Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar tercapai 22,86% dari target 14,29% dengan tingkat capaian 159,97%;
- f) Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak tercapai 25,71% dari target 25% dengan tingkat capaian 102,84%;
- g) Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya tercapai 100% dari target 82,85% dengan tingkat capaian 120,7%;
- h) Rasio korban kekerasan terhadap anak tercapai 11,15 per 100.000 penduduk dari target 11,5% dengan tingkat capaian 103,14%;
- i) Persentase korban kekerasan anak terlayani tercapai 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%;
- j) Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan tercapai 75% dari target 61,11% dengan tingkat capaian 122,73%;
- k) Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) tercapai 69,46% dari target 65,58% dengan tingkat capaian 105,92%;
- l) Unmetneed tercapai 7,79% dari target 10% dengan tingkat capaian 128,37%;
- m) Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan tercapai 36,45% dari target 28% dengan tingkat capaian 130,18%;

Sedangkan untuk indikator kegiatan sebanyak 36 indikator kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan rincian pada Tabel 2.1.

3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan :
 - a) Sinergi antara K/L, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelibatan berbagai unsur *pentahelix* secara optimal;

- b) Layanan pengaduan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak yang responsif;
 - c) Sosialisasi anti kekerasan perempuan dan anak dilakukan secara masif melalui sekolah, komunitas dan media sosial;
 - d) Adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, yang kemudian diatur lebih lanjut pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut. Pergub ini secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG) di seluruh Perangkat Daerah;
 - e) Cakupan Pelayanan KB di 35 Kab/Kota serta penggerakan KB bersama mitra dilakukan secara intensif;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPD Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 yang melebihi target kinerja program/kegiatan sebagai salah satu faktor yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta mendorong pembangunan keluarga yang berkualitas di Jawa Tengah.
5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan antara lain:mengoptimalkan sumberdaya internal untuk mencapai target kinerja secara efektif dan efisien; mendorong kolaborasi jejaring/mitra kerja baik di level Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota; meningkatkan KIE PPPA dan Dalduk KB dengan efektif (media sosial, poster, banner dan lain sebagainya).

Capaian Kinerja Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana selengkapny dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Per 100.000	-	7,90	-	-	-	-	-	-
		Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	70		60	80	133,33	80	82,86	103,58
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase OPD yang menyusun PPRG di Provinsi	%	-	42,85	60	60	100	60	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	%	15	-	10	10,37	103,70	10,37	16,29	148
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang memahami advokasi, pendampingan, dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial	%	-	30	40	68,40	171	68,40	-	-
		Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	%	80	-	70	78	111,43	78	78	104
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	-	4,38	5,4	4,38	123,29	4,38	-	-
		Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	-	20	-	-	-	-	-	-
		Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	50	-	11	28,57	259,73	28,57	42,86	136,41

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	-	100	100	100	100	100	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	-	75	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	%	58	-	43	44,44	103,35	44,44	50	96,15
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	-	100	-	-	-	-	-	-
		Persentase perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100		100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	114	8	10	11	110	11	12	100
		Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	Kelompok	-	10	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender	%	-	63,88	40	63,88	159,70	63,88	-	-
		Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	%	-	63,88	40	63,88	159,70	63,88	-	-
		Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	25,71	-	14,29	22,86	159,97	22,86	25,71	128,55
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	%	-	100	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	%	100	-	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	%	-	42,85	-	-	-	-	-	-
		Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	%	100	-	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	%	-	100	-	-	-	-	-	-
		Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	-	20	-	-	-	-	-	-
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	88,57	-	82,85	100	120,70	100	85,71	103,44

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	Kab/kota	-	35	-	-	-	-	-	
		Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	Kab/kota	4	-	4	15	375	15	3	75
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	Kelompok	20	10	20	20	100	20	20	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	11,7	10,33	11,50	11,15	103,14	11,15	6,6	177,18
		Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	-	20	-	-	-	-	-	-
		Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	-	100	100	100	100	100	100
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	%	-	50	-	-	-	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
		Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	%	37,14		31,4	34,29	109,20	34,29	40	116,95
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar	%	-	100	-	-	-	-	-	-
		Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg membutuhkan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	%	100		100	100	100	100	100	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	Kelompok	15	15	15	15	100	15	15	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi	Kelompok	15	10	-	-	-	-	-	-
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang	%	-	44,44	-	-	-	-	-	-
		Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	-	25	-	-	-	-	-	-
		Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	62	-	61,11	75	122,73	75	88,88	155,93

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	Kab/Kota	-	16	-	-	-	-	-	
		Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Kab/Kota	22	-	18	27	150	27	32	160
	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	-	15	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	-	1	1	100	1	1	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	-	29,58	-	-	-	-	-	-
		Unmeetneed KB	%	9,8	11,63	10	7,79	128,37	7,79	6,41	121,37

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	66,4	-	65,58	69,46	105,92	69,46	66,74	96,07
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta KB Aktif	Orang	-	4.346.881	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	%	31,5	-	27	27,1	100,37	27,1	28,33	103
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa) dalam pembinaan kesertaan berKB	%	-	27,65	-	-	-	-	-	-
		Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	%	20	-	10	10,66	106,6	10,66	17,56	175
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan	%	-	97,79	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
		Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan	%	-	91,53	-	-	-	-	-	-
		Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota	%	-	25	-	-	-	-	-	-
		Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	36	-	28	36,45	130,18	36,45	35,79	111,84
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok tribina yang aktif	Kelompok	-	21.854	-	-	-	-	-	-
		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	Angka	18,5	-	19	13,70	138,69	13,70	13,7	129,19
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif	Kelompok	-	7.333	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase ormas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam ketahanan pembangunan keluarga	%	-	30	-	-	-	-	-	-
		Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	30	-	30	66,65	222,17	66,65	30	100
	Non Urusan										
	Eks BAU										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	=	90	-	-	-	-	-	
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	=	100	-	-	-	-	-	
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	90	-	90	90	100	90	90	100
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	70	-	50	50	100	50	50	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	35	-	25	25,71	102,84	25,71	25,71	100
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	%	15	-	9	11,40	126,67	11,40	14,28	119
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	60	-	40	40	100	40	50	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	-	1	1	100	1	1	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	-	1	1	100	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	-
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	90	-	90	90	100	90	90	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	-
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	90	-	90	90	100	90	90	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	-	2	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	5		5	5	100	5	5	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1		1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	-	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1		4	4	100	4	4	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024 kinerja pelayanan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan dengan indikator Pengeluaran perempuan per kapita sebesar 10.892 Ribu Rupiah dari target 10.100 dengan tingkat ketercapaian 107,84%; Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 4,38 per 100.00 dari target 5,4 dengan tingkat ketercapaian 123,29%; Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 64,34 pada tahun 2023 dari target 66 dengan tingkat ketercapaian 97,48%; Meningkatkan Keluarga Berkualitas dengan indikator Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan sebesar 4,36% dari target 2 engan tingkat ketercapaian 218% dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) sebesar 87,51 dari target 73,5 dengan tingkat ketercapaian 119,06%

Berikut rincian capaian masing – masing sasaran : 1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dengan indikator Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha sebesar 40% dari target 40% sehingga tingkat capaiannya 100%; 2. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan dengan indikator Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 4,25 per 100.000 dari target 4,25 sehingga tingkat capaiannya 100%; 3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 60,76 pada tahun 2023 dari target 70 sehingga tingkat capaiannya 89,80% ; 4. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak dengan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 77,86 pada tahun 2023 dari target 75 sehingga tingkat capaiannya 103,81%; 5. Terkendalinya Jumlah Penduduk dengan indikator Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,03 dari target 2,13 sehingga tingkat capaiannya 104,93%; 6. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha sebesar 100% dari target 100% sehingga tingkat capaiannya 100%; 7. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko

Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,92 dari target 2,75 sehingga tingkat capaiannya 106,18%; 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,87 dari target 87,9 sehingga tingkat capaiannya 101,1%.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja pada urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				2024	2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan			60	-	80	-	
2	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar			14,29	-	22,86	-	Standarisasi dilakukan secara terpusat
3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya			82,85	-	82,85	-	
4	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak			25	-	25,71	-	
5	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar			11	-	28,57	-	
6	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani			100	-	100	-	
7	Rasio korban kekerasan terhadap anak			11,5	-	11,15	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Persentase korban kekerasan anak terlayani			100	-	100	-	
9	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi			-	11	10,63	16,29	Penghitungan ARG tidak termasuk belanja pegawai
10	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha			-	80	-	80	
11	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan			31,42	71	28,57	42,86	Sudah terbentuk 15 UPTD PPA Kab/Kota
12	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga			-	15	-	15	
13	Persentase kab/kota yang mempunyai puspaga aktif			-	30	-	30	Puspaga yang terstandar oleh KPPA
14	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)			-	62	-	62	Capaian 2024 belum ada
15	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)			-	79	-	79	Capaian 2024 belum ada
16	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh Kabupaten/Kota pada aplikasi sistem informasi gender dan anak Jawa Tengah (SIGA JATENG)			-	30	-	30	Data Pilah gender dan anak di Kabupaten/Kota masih belum komprehensif
B	URUSAN DALDUK KB							

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				2024	2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<i>Unmetneed</i> KB			10	7,78	7,79	6,41	Data rilis resmi tahunan dan Data <i>New Siga</i> bulanan
2	Persentase <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)</i>			65,58	69,47	69,46	66,74	
3	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan			61,11	-	75	-	Adanya regulasi untuk mendorong PJKP dan optimalisasinya
4	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan			28	32	36,45	35,79	
5	Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah			-	71	-	88,88	
C	EKS BAU							
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			90	90	90	90	
2	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			45	50	45	50	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan sinergi program antar perangkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat.

- a) Upaya dalam pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dimulai dari keselarasan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan implementasi kegiatan secara terintegrasi secara lintas sektor. Koordinasi dan sinergi program kegiatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana harus berjalan dengan baik. Usulan kebutuhan dalam forum perangkat daerah yang diikuti *stakeholders* terkait tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta unsur *hexahelix* telah diakomodir dan menjadi bahan penyusunan program kegiatan di tingkat provinsi. Kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota yang harus selaras dengan capaian target indikator kinerja di tingkat Provinsi dan Pusat.
- b) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN Perwakilan Jawa Tengah telah dilakukan melalui penyelarasan indikator kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB serta indikator pada Rancangan Induk Pembangunan Kesehatan (RIBK) tahun 2025 – 2029 yang memuat beberapa indikator dan target urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penyelarasan tersebut diharapkan akan mampu memberikan hasil yang optimal antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian kinerja pembangunan nasional. Pengintegrasian program prioritas Kementerian PPPA dan Kemendukbangga telah dimasukkan dalam program dan kegiatan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah melalui 136

Program yang terdiri dari 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi dan 42 program taktis dari penjabaran visi dan misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2025 – 2029.

- c) Penyesuaian kebijakan yang sinergis dari pusat, harus diintervensi di daerah sebagai upaya sinkronisasi program dan kegiatan secara komprehensif. Kebijakan dari Pusat diantaranya adalah :

Program Prioritas dari Kementerian PPPA yaitu :

- ❖ Ruang Bersama Indonesia;
- ❖ Perluasan jangkauan SAPA 129;
- ❖ Satu data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.

Sedangkan program prioritas dari Kemendukbangga yaitu :

- ❖ Taman Asuh dan Sayang Anak (Tamasya);
- ❖ Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting);
- ❖ Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI);
- ❖ *Supperapps* tentang keluarga dan;
- ❖ Lansia berdaya.

2. **Beberapa permasalahan dan hambatan internal yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah antara lain :**

- a) Belum optimalnya peningkatan kompetensi seluruh SDM yang ada, karena keterbatasan jenis pelatihan/bimtek yang dapat teranggarkan.
- b) Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi

3. **Beberapa permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan urusan PPPA dan Dalduk KB antara lain:**

Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di level Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan belum optimal yang menyebabkan capaian kinerja dalam PPE Kabupaten/Kota belum banyak yang dilevel mentor atau utama;
- b) Kelompok kerja PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dalam mendorong, mendampingi dan mengawasi implementasi kebijakan PPRG di daerah yang menyebabkan capaian Anggaran

Responsif Gender (ARG) di level provinsi masih 10-11% dari total pagu;

- c) Rendahnya kapasitas, ketrampilan dan akses permodalan serta pemasaran bagi perempuan;
- d) Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai UPTD PPA terstandar sebagai upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan perempuan dan anak;
- e) Belum semua Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kecamatan mempunyai SDM yang berkompeten;
- f) Rendahnya implementasi kebijakan responsif hak anak di Kabupaten/Kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- g) Rendahnya keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan terutama partisipasi anak pada proses pengambilan keputusan di level Desa dan Kecamatan;
- h) Masih tingginya jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual terutama kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) serta *bullying* pada anak;
- i) Masih tingginya angka perkawinan usia anak;
- j) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone atau mengakses internet, menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- k) Belum optimalnya implementasi sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);
- l) Masih rendahnya komitmen penyediaan data sektoral pilah gender dan anak.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a) Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun pedoman Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)/Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan;
- b) Belum optimalnya keaktifan kader tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung ketahanan keluarga;

- c) Belum optimalnya KIE KB dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau PUS, terutama didaerah perbatasan dan terpencil.
 - d) Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi, terutama KB MKJP;
 - e) Rasio PLKB dengan jumlah desa dan PUS yang tidak proporsional;
 - f) Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
4. **Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :**

Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a) 136 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang didalamnya terkait urusan Perempuan dan Anak yaitu Kecamatan Berdaya dan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) serta mendorong PUG yang berkeadilan;
- b) Adanya rencana perluasan layanan korban kekerasan sampai tingkat kecamatan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA);
- c) Adanya Kecamatan Berdaya untuk mendukung sinergitas program terkait pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga;
- d) Tersedianya kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak (Perda PUG, Perda penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, dan Perda Perlindungan Anak);
- e) Dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- f) Adanya dukungan kerjasama dari berbagai lembaga dan mitra kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- g) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG`s*) Tahun 2015-2030);

- h) Adanya kerjasama terkait perlindungan perempuan dan anak dengan unsur *hexahelix* seperti Kerjasama Gojek dan Grab serta akademisi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan dan lainnya;
- i) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a) Program prioritas dari Kemendukbangga terkait urusan Dalduk KB.
 - b) Komitmen integrasi kebijakan Kampung KB dan Kecamatan Berdaya;
 - c) Adanya kebijakan terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Pusat dan draft Pembangunan Peta Jalan Kependudukan (PJPk) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 untuk menjadi pedoman di Daerah;
 - d) Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program KKBPK;
 - e) Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
 - f) Implementasi Kebijakan terkait kampung KB yang menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.
5. **Dampak terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah serta target kegiatan urusan PPPA dan Dalduk KB**, antara lain:
- a) **Kesetaraan gender** : Masih adanya ketimpangan gender dari keterwakilan perempuan di bidang politik dan ekonomi, sumbangan pendapatan perempuan masih dibawah laki-laki, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki sehingga perlu peningkatan akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan. Selain itu juga, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih dibawah laki-laki. Sehingga diperlukan perencanaan dan penganggaran responsif gender lintas sektor dengan mengacu pada program taktis Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mendorong terciptanya

pengarusutamaan gender yang berkeadilan diberbagai bidang kehidupan.

- b) Pemenuhan Hak Anak :** Perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dari berbagai kategori sebagai wujud pemenuhan hak anak dalam pembangunan di Jawa Tengah pada tahun 2025 sudah 100% atau 35 Kabupaten/Kota sudah mendapat predikat KLA. Walaupun sudah baik, tetapi ada Kabupaten/Kota yang menurun predikatnya serta implementasi kebijakan pemenuhan hak anak seperti sekolah ramah anak, puskesmas layak anak, pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pemenuhan hak anak seperti pentingnya Desa/Kelurahan dan Kecamatan ramah anak di Kabupaten/Kota masih belum optimal sehingga perlu terus didorong agar pemenuhan hak anak dapat dirasakan merata di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c) Perlindungan Perempuan dan Anak :** Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak sampai TW II tahun 2025 sebanyak 671 korban yang terdiri korban kekerasan perempuan sebanyak 266 orang dan korban kekerasan anak sebanyak 405 orang. Makin masifnya penggunaan teknologi (Internet, *Handphone*, Media Sosial) memberikan dampak meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dan perundungan dilingkungan pendidikan dan pondok pesantren. Upaya yang harus segera dilakukan adalah optimalisasi jangkauan pelayanan dan pencegahan kekerasan melalui program intervensi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, melalui rumah perlindungan perempuan dan anak serta disabilitas di setiap Kecamatan.
- d) Pembangunan Kualitas Keluarga :** Terjadinya berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan perempuan dan anak adalah kurangnya pendidikan keluarga yang seharusnya diajarkan sejak dini. Kekerasan terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH), *bullying* dan lain sebagainya merupakan salah satu bukti kurangnya pola pengasuhan yang baik dari keluarga. Peran ayah juga dirasa kurang maksimal dalam mendorong mental tumbuh kembang anak yang positif sehingga diperlukan peran Pusat

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten/Kota untuk mendorong lingkungan keluarga yang repsonsif gender dan hak anak. Tetapi tantangan yang ada selama ini adalah kurangnya SDM yang mumpuni serta tidak semua PUSPAGA didaerah sudah terstandart. Pada saat ini PUSPAGA yang terstandar di Kabupaten/Kota masih 9 Puspaga atau 25,71% dari 35 Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kab. Rembang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta.

e) Kesertaan Keluarga Berencana : Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) sebesar 66,74%, Persentase Penggunaan KB MKJP Tahun 2025 sebesar 28,33%. Adapun pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmeetneed) tahun 2025 sebesar 6,41%. Adapun penurunan mCPR disebabkan karena Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami kenaikan sedangkan Peserta Aktif mengalami penurunan.

f) Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 pilar dalam pembangunan sebesar 88,88% dari 35 Kab/Kota yaitu sebanyak 32 Kab/Kota dan Provinsi Jawa Tengah. Adapun Jumlah Kampung KB Mandiri dan Berkelanjutan sebanyak 3.065 (35,79%) Desa dengan total jumlah Kampung KB yang sudah terbentuk adalah 8.565 desa (100%).

6. Rekomendasi dan Catatan Kegiatan Strategis melalui program prioritas yang dapat mendorong pencapaian target program urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Kualitas Keluarga antara lain:

- a) Kegiatan urusan pemberdayaan perempuan akan lebih diarahkan pada implementasi Kecamatan Berdaya yang sinergi dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI) dengan pelibatan semua sektor di level Provinsi, Kabupaten/Kota.
- b) Mendorong peningkatan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan dan meningkatkan wirausaha baru perempuan.

- c) Mendorong implementasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kecamatan untuk meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak.
 - d) Sosialisasi dan advokasi lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - e) Meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik melalui sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam berbagai Bidang Pembangunan berkerjasama dengan legislatif.
 - f) Mendorong implemementasi PUG di Provinsi dan Kabupaten Kota.
 - g) Mendorong implementasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten/Kota secara optimal serta mendorong pemenuhan indikator dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
 - h) Mendorong pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak melalui pengasuhan positif, KIE Kespro bagi remaja dan disiplin positif di lingkungan pendidikan dan pondok pesantren.
 - i) Optimalisasi layanan Unit Pelaksana Terpadu Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta layanan SAPA 129.
 - j) Peningkatan kualitas dan kuantitas data pilah gender dan anak.
7. **Rekomendasi dan Catatan Kegiatan Strategis melalui program prioritas melalui program prioritas yang dapat mendorong pencapaian target program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, antara lain:
- a) Mendorong peningkatan kesertaan KB kepada masyarakat, terutama KB MKJP.
 - b) Penggerakan KB bekerjasama dengan mitra kerja lintas sektor.
 - c) Peningkatan kapasitas dan advokasi bagi kader Tribina (BKL,BKB dan BKR) dan Pengelola PIK Remaja dalam mendorong ketahanan keluarga yang sinergis dengan Lansia Berdaya, Taman Asuh dan Sayang Anak (TAMASYA).
 - d) Advokasi Kabupaten/Kota untuk mendorong Kampung Keluarga Berkualitas sinergi dengan RBI dan Kecamatan Berdaya.
 - e) Mendorong Kabupaten/Kota agar GDPK 5 Pilar yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan.

- f) Percepatan finalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029.
- g) Advokasi lintas sektor untuk mendorong penurunan stunting melalui penggerakan KB bersama mitra yang sinergis dengan Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (GENTING).
- h) Optimalisasi keterisian data pilah gender dan anak serta data kependudukan di level Desa dan Kecamatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program	Lokasi	Idikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Tengah			16.341.824.000	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Tengah			17.318.628.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	16.134.824.000		Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%	17.073.628.000	
		Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	55%	207.000.000		Semarang dan luar semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	55%	245.000.000	
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				2.698.800.000	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				1.110.000.000	
		Jawa Tengah	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	12%	121.730.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	12%	140.000.000	
			Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	80%	2.577.070.000			Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	80%	970.000.000	

3	Perlindungan Perempuan				770.432.000	Perlindungan Perempuan				1.275.070.000	
		Jawa Tengah	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan	85%	634.392.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan	85%	1.040.000.000	
		Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	136.040.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	235.070.000	
4	Peningkatan Kualitas Keluarga				328.408.000	Peningkatan Kualitas Keluarga				155.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	20%	312.808.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	20%	70.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase kab/kota yang mempunyai puspaga aktif	24%	15.600.000		Semarang dan luar Semarang	Persentase kab/kota yang mempunyai puspaga aktif	25,71%	85.000.000	
5	Pemenuhan Hak anak (PHA)				373.720.000	Pemenuhan Hak anak (PHA)				145.000.000	
		Jawa Tengah	Indeks Pemenuhan Hak Anak	61,5	373.720.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64	145.000.000	
6	Perlindungan Khusus Anak				296.720.000	Perlindungan Khusus Anak				558.090.000	
		Jawa Tengah	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79	160.680.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	81	303.020.000	

		Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	136.040.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	255.070.000	
7	Pengendalian Penduduk				160.000.000	Pengendalian Penduduk				110.000.000	
		Jawa Tengah	Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	75%	160.000.000		Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	75%	110.000.000	
8	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				389.667.000	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				840.000.000	
		Jawa Tengah	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	69,48	389.667.000		Jawa Tengah	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) ***	69,75	840.000.000	
9	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				177.353.000					445.000.000	
		Semarang dan luar Semarang	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	34%	177.353.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Semarang dan luar Semarang	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	34%	445.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, lembaga masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan unsur lainnya serta perangkat daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PPPA					
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	900	Mendorong terciptanya PUG yang berkeadilan
2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	40%	Mendorong peningkatan kapasitas dan peran perempuan
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	25%	Program Prioritas Gubernur (program intervensi)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%	Layanan korban kekerasan perempuan dan anak
3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	15 Unit	
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100%	Layanan bagi Keluarga
2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	20%	
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah kab/kota dengan predikat KLA minimal Madya	30 Kab/kota	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	35 Lembaga	Program Prioritas Gubernur (program intervensi)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak	25%	Program Prioritas Gubernur (program intervensi)
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100%	Layanan korban kekerasan perempuan dan anak
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	50 Lembaga	
URUSAN DALDUK KB					
VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
1	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Provinsi Jawa Tengah	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27,9%	Safari peningkatan kesertaan KB
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB.	Provinsi Jawa Tengah	Unmetneed KB	9,25%	Kolaborasi mitra kerja dalam Bangga Kencana

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan	28 kab/kota	GDPK dan PJPk dalam dokumen perencanaan
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	1 dokumen	
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
1	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Provinsi Jawa Tengah	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	16	
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Provinsi Jawa Tengah	Persentase kelompok UPPKA yang aktif	95%	
		Provinsi Jawa Tengah	Persentase kelompok tribina yang aktif	95%	
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50%	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90%	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%	
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6 unit	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	2 laporan	
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jawa Tengah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	2 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 telah diselaraskan dengan Arah kebijakan pembangunan nasional urusan PPPA yang bertujuan Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan sasaran strategis antara lain:

1. Implementasi program prioritas Kementerian PPPA yaitu pembentukan Ruang Bersama Indonesia, Perluasan Jangkauan Layanan SAPA 129 dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa;
2. Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Penguatan PUG dalam Pembangunan;
4. Peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Bebas dari Kekerasan termasuk TPPO;
5. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak secara komprehensif;
6. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya;
7. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA;
8. Mewujudkan Pembangunan keluarga yang berkualitas;

Sedangkan kebijakan nasional terkait urusan Dalduk KB antara lain :

1. Peningkatan layanan KB dan Kesehatan Reproduksi bagi perempuan dan remaja;
2. Implementasi *Quick Win* Kemendukbangga yang meliputi Taman Asuh dan Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (Genting), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), *Supperapps* tentang keluarga dan Lansia berdaya;
3. Peningkatan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan;
4. Pencegahan dan penurunan stunting;
5. Implementasi GDPK dalam pembangunan;
6. Implementasi PJPk di Jawa Tengah;

7. Peningkatan kapasitas kader atau personel di Desa atau Kecamatan (Satyagraha, tribuna, UPPKA, tim pendamping keluarga/TPK dan PPKBD) yang mendukung kinerja urusan Dalduk KB;
8. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 yang telah dirubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, antara lain : perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, serta layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mendasarkan pada isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, tujuan Renja dirumuskan untuk :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender;
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak;
3. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Meningkatkan Keluarga Berkualitas;
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

Guna mendukung pencapaian tujuan Renja tersebut, sasaran difokuskan pada :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
2. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan secara optimal dan komprehensif;
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak;
4. Meningkatnya perlindungan khusus anak;
5. Terkendalinya jumlah penduduk;
6. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksi OPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran dituangkan dalam table berikut.

Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak		IKG (Indeks Ketimpangan Gender)	Angka	0,315
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,35
		Meningkatnya peran perempuan dalam bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,47

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
2	Meningkatnya Keluarga Berkualitas		IPKK (Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga)	Angka	74,08
		Terkendalinya Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,1
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,5
3	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	87,7
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Angka	2,95
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	89

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 terdiri dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah beserta pendanaan yang menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan program prioritas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Program dan Kegiatan.

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi sebesar 12% dan Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha sebesar 80%.

b. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan sebesar 85% dan Persentase

korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi; Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga sebesar 20% dan Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih sebesar 24%.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak sebesar 61,5%.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi (dak); Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 79 dan Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif sebesar 100%.

g. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka

Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah sebesar 75%.

h. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) sebesar 69,48%.

i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan sebesar 34%.

j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan

keuangan perangkat daerah sebesar 100% dan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah sebesar 55%.

Adapun Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, sebagaimana pada Tabel 4.1. Adapun Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan:

Tabel 4. 1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak *										4.468.080.000		3.745.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *	Angka	0,308	0,315			0,301	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang pembangunan **									3.782.040.000		2.692.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Pembangunan Gender (IPG) **	Angka	93,44	93,47	3.782.040.000	93,49	2.692.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ***								2.698.800.000		1.140.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi ***	%	10,37	12	121.730.000	13	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi ****							121.730.000		50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Tersedianya hasil evaluasi penyelenggaraan PUG di Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi ****	Nilai	901	900	121.730.000	900	50.000.000	Pokja Kesetaraan Gender
				Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi *****						25.800.000		14.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek *****	Orang	80	35	25.800.000	70	14.000.000	Pokja Kesetaraan Gender
				Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi *****						55.000.000		17.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan *****	Lembaga	10	5	55.000.000	5	17.000.000	Pokja Kesetaraan Gender
				Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi *****						40.930.000		19.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) *****	Lembaga	50	35	40.930.000	50	19.000.000	Pokja Kesetaraan Gender
					Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha ***	%	80	80	2.577.070.000	90	1.090.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	
														Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi ****							2.577.070.000		1.090.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Meningkatnya kapasitas perempuan dalam kelembagaan diberbagai bidang pembangunan	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya ****	%	N/A	40	2.577.070.000	60	1.090.000.000		Pokja Kesetaraan Gender
				Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi *****						1.439.500.000		40.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi *****	Lembaga	6	3	1.439.500.000	4	40.000.000		Pokja Kesetaraan Gender
				sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi *****						705.070.000		200.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi *****	Orang	N/A	35	705.070.000	35	200.000.000		Pokja Kesetaraan Gender

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi *****						432.500.000		850.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan *****	Orang	N/A	80	432.500.000	80	850.000.000	Pokja Kesetaraan Gender
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ***								634.392.000		1.352.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan ***	%	14	85	634.392.000	95	1.352.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****							115.750.000		102.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Meningkatnya kab/kota yang mengimplementasikan rumah perlindungan perempuan di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan *****	%	N/A	25	115.750.000	30	102.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan
					Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****					14.750.000		50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	N/A	1	14.750.000	1	50.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****						50.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi *****	Orang	N/A	35	50.000.000	35	40.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi *****						51.000.000		12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota *****	Kegiatan	35	5	51.000.000	35	12.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi *****							518.642.000		1.250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan di Kabupaten/Kota yang terstandarisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi *****	Unit	N/A	15	518.642.000	20	1.250.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi *****						347.642.000		330.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek *****	Orang	10	15	347.642.000	15	330.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan
				penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						115.000.000		800.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan *****	Dokumen	5	5	115.000.000	5	800.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan
				Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi *****						56.000.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) *****	Lembaga	N/A	5	56.000.000	5	120.000.000	Pokja Perlindungan Perempuan
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN ***								136.040.000			
					Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif ***	%	100		136.040.000	100	166.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						136.040.000		166.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Terlayannya korban kekerasan perempuan yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan ****	%	100	100	136.040.000	100	166.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						9.270.000		19.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	5	9.270.000	12	19.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****					10.000.000		17.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	10	10.000.000	12	17.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****					17.720.000		78.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	10	17.720.000	30	78.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						6.750.000		12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	2	6.750.000	1	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						87.300.000		16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	12	87.300.000	20	16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						3.500.000		12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	7	3.500.000	9	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						1.500.000		12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	2	1.500.000	2	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ***								312.808.000		34.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga ***	%	10	20	312.808.000	25	34.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi *****							312.808.000		34.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Meningkatnya kualitas pembangunan ketahanan keluarga	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga *****	%	14	20	312.808.000	25	34.000.000	Pokja Kesetaraan Gender

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota *****						312.808.000		34.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota *****	Lembaga	10	10	312.808.000	10	34.000.000	Pokja Kesetaraan Gender
	Meningkatnya Perlindungan Anak **									686.040.000		1.053.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Perlindungan Anak (IPA) **	Angka	N/A	65,35	686.040.000	66,7	1.053.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA ***								15.600.000		63.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih ***	%	4,25	24	15.600.000	34	63.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							15.600.000		63.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Meningkatnya ketersediaan Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak ****	%	100	100	15.600.000	100	63.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak
				layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						15.600.000		63.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	20	20	15.600.000	20	63.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) ***								373.720.000		606.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak ***	Angka	60,76	61,5	373.720.000	62	606.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi ****							271.100.000		575.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya predikat KLA kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat KLA minimal Madya ****	Kabupaten /Kota	29	30	271.100.000	31	575.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak
				Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi *****						271.100.000		575.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi *****	Lembaga	N/A	20	271.100.000	20	575.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi ****							102.620.000		31.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya jumlah lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak yang mendapat KIE Layanan Ramah Anak	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak *****	Lembaga	35	35	102.620.000	35	31.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak *****						43.840.000		10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak *****	Kegiatan	1	3	43.840.000	3	10.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak
				Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi *****						51.780.000		8.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi *****	Dokumen	1	1	51.780.000	1	8.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi *****						7.000.000		13.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan *****	Lembaga	N/A	10	7.000.000	10	13.000.000	Pokja Pemenuhan Hak Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ***								160.680.000		226.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) ***	Angka	77,86	79	160.680.000	79,4	226.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****							96.000.000		81.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan rumah perlindungan anak di kecamatan	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak *****	%	N/A	25	96.000.000	30	81.000.000	Pokja Perlindungan Anak
				Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****						25.000.000		13.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****	Orang	N/A	30	25.000.000	35	13.000.000	Pokja Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi *****						51.000.000		13.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota *****	Lembaga	N/A	35	51.000.000	35	13.000.000	Pokja Perlindungan Anak
				Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		43.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****	Dokumen	N/A	1	10.000.000	1	43.000.000	Pokja Perlindungan Anak
				monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****						10.000.000		12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi *****	Laporan	N/A	1	10.000.000	1	12.000.000	Pokja Perlindungan Anak
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						64.680.000		145.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Meningkatnya kapasitas lembaga layanan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi dan dikuatkan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya ****	Lembaga	10	50	64.680.000	50	145.000.000	Pokja Perlindungan Anak
				pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi ****						15.000.000		115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ****	Lembaga	N/A	3	15.000.000	3	115.000.000	Pokja Perlindungan Anak
				Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi ****						34.680.000		17.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ****	Orang	260	25	34.680.000	25	17.000.000	Pokja Perlindungan Anak
				Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi ****						15.000.000		13.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) *****	Lembaga	N/A	10	15.000.000	3	13.000.000	Pokja Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK ***								136.040.000		158.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif ***	%	100	100	136.040.000	100	158.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi ****							136.040.000		158.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Terlayannya korban kekerasan anak yang membutuhkan layanan rujukan lanjutan	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan ****	%	100	100	136.040.000	100	158.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						17.720.000		77.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	96	10	17.720.000	120	77.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						87.300.000		16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	96	12	87.300.000	120	16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						10.000.000		16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	10	10.000.000	12	16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						9.270.000		16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	5	9.270.000	12	16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota& *****						1.500.000		11.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	2	1.500.000	2	11.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						3.500.000		11.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	7	3.500.000	9	11.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****						6.750.000		11.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****	Orang	N/A	2	6.750.000	1	11.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Keluarga Berkualitas *										727.020.000		959.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
						Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) *	Angka	74,8	74,08		77,79		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terkendalinya Jumlah Penduduk **									389.667.000		520.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Total Fertility Rate (TFR) **	Angka	2,03	2,1	389.667.000	2,1	520.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) ***								389.667.000		520.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
					Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) ***	%	69,46	69,48	389.667.000	69,49	520.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
			Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal ****							352.667.000		480.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
					Meningkatnya Akseptor KB MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP ****	%	27,1	27,9	352.667.000	28,3	480.000.000	Pokja Keluarga Berencana
				Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal *****						148.000.000		100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal *****	Dokumen	40	10	148.000.000	30	100.000.000	Pokja Keluarga Berencana
				Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana *****						35.856.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
					Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) *****	Daerah	7	4	35.856.000	4	60.000.000	Pokja Keluarga Berencana
					Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja *****					168.811.000		320.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
					Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja *****	Daerah	18	4	168.811.000	10	320.000.000	Pokja Keluarga Berencana
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****							37.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Menurunnya jumlah PUS tidak terlayani menggunakan kontrasepsi modern	Unmetneed KB ****	%	7,79	9,25	37.000.000	7,74	40.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB
				Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****						37.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
					Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB *****	Organisasi	2	2	37.000.000	3	40.000.000	Pokja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KB
	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga **									337.353.000		439.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) **	Angka	63,9	64,5	337.353.000	64,75	439.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ***								160.000.000		129.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah ***	%	68	75	160.000.000	80	129.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk ****						151.230.000		122.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi penyusunan GDPK 5 Pilar	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK 5 pilar dalam pembangunan ****	Kabupaten /Kota	25	28	151.230.000	29	122.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk
				Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat *****						36.170.000		25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat *****		Dokumen	N/A	1	36.170.000	1	25.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk
				Advokasi dan Sosialisasi GDPK *****						22.488.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK *****		Laporan	2	3	22.488.000	3	60.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi *****						26.780.000		22.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
				Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi *****		Dokumen	2	2	26.780.000	2	22.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain *****						65.792.000		15.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain *****	Daerah	2	2	65.792.000	2	15.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi *****							8.770.000		7.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Tersedianya dokumen pemetaan Perkiraan Penduduk	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan. *****	Dokumen	N/A	1	8.770.000	1	7.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk
				Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) *****						8.770.000		7.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga *****	Dokumen	1	1	8.770.000	1	7.000.000	Pokja Pengendalian Penduduk

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
		PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) ***								177.353.000		310.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan ***	%	30,3	34	177.353.000	36	310.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
			Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ****							88.586.000		110.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Menurunnya jumlah perempuan melahirkan pertama kali di usia 15 - 19 tahun	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) ****	per 1000 WUS 15 - 19 tahun	17,3	16	88.586.000	15	110.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera
				Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB *****						27.109.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) di Kampung KB *****	Organisasi	3	3	27.109.000	3	30.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera
					Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana *****					25.570.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana *****	Kelompok	N/A	3	25.570.000	3	40.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja *****						35.907.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja *****	Daerah	3	3	35.907.000	3	40.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ****							88.767.000		200.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Meningkatnya kelompok UPPKA yang aktif	Persentase kelompok UPPKA yang aktif ****	%	92,9	95	49.138.000	96	70.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera
				Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas *****						13.210.000		30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas *****	Kabupaten /Kota	3	3	13.210.000	3	30.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera
				Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota *****						35.928.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota *****	Laporan	1	2	35.928.000	2	40.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Meningkatnya kelompok tribina (BKB, BKR dan BKL) yang aktif	Persentase kelompok tribina yang aktif ****	%	92,9	95	39.629.000	96	130.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera
				Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga *****						39.629.000		130.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
					Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga *****	Organisasi	3	2	39.629.000	2	130.000.000	Pokja Keluarga Sejahtera
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana *										16.341.824.000		16.369.840.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana *	Angka	87,51	87,7			87,8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **									207.000.000		272.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
						Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **	Angka	2,92	2,95	207.000.000		2,98	272.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***								207.000.000		272.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ***	%	45	55	207.000.000		60	272.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****							207.000.000		272.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	40	50	207.000.000	55	272.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****						55.000.000		65.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****	Dokumen	1	7	55.000.000	7	65.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						62.000.000		77.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****	Laporan	1	5	62.000.000	5	77.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah ****						60.000.000		90.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah ****	Data	N/A	1	60.000.000	1	90.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ****						30.000.000		40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah ****	Dokumen	N/A	1	30.000.000	1	40.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian									16.134.824.000		16.097.840.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	
	Penduduk Dan Keluarga Berencana **													
						Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana **	Angka	88,87	89	16.134.824.000	89,1	16.097.840.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***								16.134.824.000		15.499.840.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ***	%	90	90	15.506.272.000	100	15.499.840.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****							11.876.189.000		12.950.728.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	1	1	11.876.189.000	1	12.950.728.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****						11.457.489.000		12.610.728.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	60	71	11.457.489.000	70	12.610.728.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						326.000.000		310.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	326.000.000	1	310.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****						20.000.000		20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD *****						72.700.000		10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD *****	Laporan	1	1	72.700.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ****							60.000.000		62.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1	60.000.000	1	62.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****								0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	0	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****						60.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****								2.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	1	0	0	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							40.000.000		108.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	90	90	40.000.000	90	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****								0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	0	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						10.000.000		10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****								0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	20	0	-	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****						15.000.000		38.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	25	20	15.000.000	25	38.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****						15.000.000		60.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	50	20	15.000.000	50	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah *****							601.383.000		453.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *****	%	90	90	601.383.000	90	453.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						8.000.000		8.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	1	8.000.000	1	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						55.462.000		64.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	5	2	55.462.000	5	64.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****						10.000.000		10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	2	1	10.000.000	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****						116.921.000		124.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	12	116.921.000	12	124.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *****						7.000.000		8.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	5	1	7.000.000	3	8.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan *****						50.000.000		26.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	3	1	50.000.000	1	26.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Fasilitasi Kunjungan Tamu *****								0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	1	0	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						276.000.000		135.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	276.000.000	1	135.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****						7.000.000		7.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****						71.000.000		71.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	1	1	71.000.000	1	71.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							7.000.000		33.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	5	3	7.000.000	3	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****								0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	N/A	0	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Mebel *****								10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	5	0	0	2	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****								7.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	0	0	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****								7.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	0	0	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								2.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	4	0	0	2	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						7.000.000		7.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	1	7.000.000	1	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****							2.325.510.000		1.543.140.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	1	1	2.325.510.000	1	1.543.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****						2.000.000		2.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	1	1	2.000.000	1	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						348.990.000		310.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	348.990.000	1	310.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****								3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	0	-	1	3.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						1.974.520.000		1.228.140.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	1.974.520.000	1	1.228.140.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							596.190.000		349.972.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ****	Unit	1	1	596.190.000	1	349.972.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****						175.000.000		147.972.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	23	20	175.000.000	25	147.972.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Pemeliharaan Mebel *****						1.000.000		2.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	3	1	1.000.000	3	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						340.190.000		120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	2	1	340.190.000	2	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						80.000.000		80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	8	6	80.000.000	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****								0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	0	0	N/A	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
					Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ***	%	90	100	628.552.000	100	598.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *****							40.200.000		53.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)	
														Perlindungan Perempuan dan Anak
					Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun di UPTD PPA ****	Dokumen	N/A	1	40.200.000	1	53.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****						40.200.000		53.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	1	1	40.200.000	1	53.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****							6.570.000		185.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan di UPTD PPA ****	%	100	90	6.570.000	90	185.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****						6.570.000		185.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	1	6.570.000	1	185.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****							27.248.000		61.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah di UPTD PPA	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan di UPTD PPA ****	%	90	90	27.248.000	90	61.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****						1.999.000		3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	5	4	1.999.000	5	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****						4.000.000		33.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	2	4.000.000	1	33.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *****						10.500.000		4.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	1	3	10.500.000	1	4.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
													Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****						5.749.000		21.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	1	1	5.749.000	1	21.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****							2.500.000		3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan di UPTD PPA ****	Unit	1	3	2.500.000	3	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Pengadaan Mebel *****						2.500.000		3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	1	2.500.000	1	3.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							520.925.000		254.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah di UPTD PPA	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun di UPTD PPA ****	Laporan	1	1	520.925.000	1	254.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****						52.536.000		39.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	1	1	52.536.000	1	39.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****						468.389.000		215.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	1	1	468.389.000	1	215.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****							36.109.000		42.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di UPTD PPA	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan di UPTD PPA ****	Unit	1	1	36.109.000	1	42.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output/ Outcome	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024 (Realisasi)	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
									2026		2027		
									Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(22)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****						11.400.000		14.000.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	1	3	11.400.000	1	14.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Pemeliharaan Mebel *****								0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	0	0	1	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****						10.084.000		16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	1	10.084.000	1	16.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****						14.625.000		12.000.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	1	5	14.625.000	1	12.000.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Manajemen Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan setiap tahunnya , pentingnya penyusunan Manajemen Risiko adalah untuk memberikan pedoman bagi unsur pimpinan dan staf di Lingkungan OPD dalam menerapkan strategi pengendalian untuk mengantisipasi risiko kegagalan dan/atau mempercepat keberhasilan organisasi, Manajemen Risiko yang telah disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran/Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penangu ng Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran								
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Perempuan kurang berdaya dalam meningkatkan pendapatannya	Perempuan belum banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender - Optimalisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak - Sinergi antar OPD dalam Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dalam pelatihan, produksi termasuk kemudahan akses modal 	Kepala Dinas	Semester II Tahun 2026
Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih banyak terjadi di dalam	16	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada	Meningkatnya angka kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Regulasi Pencegahan 	Kepala Dinas	Semester II Tahun 2026

		keluarga dan masyarakat		belum menjadi pedoman stakeholder terkait	kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> - Anak secara komprehensif - Advokasi - Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pelayanan Kekerasan terhadap Anak di Kab/kota - Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif 		
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/ Penyedia	12	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa 	Sekretaris	Semester II Tahun 2026
Program								

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	12	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender	Pembahasan kinerja APIP dalam pengawasan PUG pada rapat internal Pokja PUG Provinsi	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	Pemkab dan Pemdes belum memberikan fasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (pemasaran dan perijinan)	12	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjadi wirausaha	1. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengintervensi permasalahan dalam pemberdayaan perempuan 2. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan pemdes dalam pemberdayaan perempuan untuk berwirausaha	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	12	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	Implementasi PHA di daerah tidak berdampak pada kesejahteraan anak	Pendampingan dan monitoring ke Kab/Kota (data dukung dilampirkan)	Kepala Bidang PHPA	Semester II Tahun 2026
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	12	Kurangnya komitmen dari pemangku	Tidak terpenuhinya	1. Pelaksanaan FGD Penyusunan	Kepala UPTD PPA	Semester II Tahun 2026

				kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	hak anak atas perlindungan	Kebijakan Perlindungan Anak 2. Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 3. Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	12	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak	1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 2. Advokasi Percepatan Penurunan Stunting 3. Pengembangan Konten Media KIE	Kepala Bidang KBKIE	Semester II Tahun 2026
Kegiatan								
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	16	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	PUG tidak berdampak pada kebijakan strategis di OPD	Mendorong OPD untuk memberdayakan <i>focal point</i> PUG	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan	Peserta tidak memahami materi yang disampaikan	12	Metode penyampaian materi kurang sesuai dengan peserta	Kapasitas perempuan dibidang ekonomi dan	Mengganti metode sosialisasi dengan partisipatif aktif peserta	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026

Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	kapasitas meningkat pemahamannya				politik masih rendah			
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap Kecamatan	16	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di Kecamatan	Aduan perempuan dan anak tidak tertangani dengan baik di Kecamatan	Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani di level kecamatan	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	12	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak	Peningkatan angka prevalensi stunting, AKI dan AKB	Koordinasi dengan OPD KB Kab/Kota untuk melakukan advokasi kepada semua PIK Remaja di Kab/Kota	Kepala Bidang Dalduk KS	Semester I Tahun 2026
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	12	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk	Safari Pelayanan KB MKJP	Kepala Bidang KBKIE	Semester I Tahun 2026

Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	12	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administratif, maupun pengembalian kerugian negara.	1. Sosialisasi Anti Korupsi dan kampanye anti Gratifikasi 2. Terapkan sistem arsip digital dan backup 3. Audit Internal kelengkapan dokumen secara berkala	Sekretaris	Semester I Tahun 2026

4.3. Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

Tabel 4. 3 Dukungan Tahapan 136 Program Daerah Tahun 2026

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan	Rumah Pelindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di 60 Kecamatan pada 35 Kab/Kota	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	KGPP	Bappeda, Dispermadesdukcapi, Dinsos, Dispora, Disdik, Disnaker, RS Provinsi, Dinkes
		Fasilitasi Pembentukan Forum anak Kecamatan	Forum Anak di 60 Kecamatan pada 35 Kab/Kota	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	PHPA	Dispermadesdukcapi, Dinsos, Dispora, Disdik, Disnaker, Dinkes
		Pelatihan Penguatan Satyagraha dan Forum Genre	Penguatan kapasitas Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Forum Generasi Berencana pada 60 kecamatan di 35 Kab/Kota untuk mendukung Kecamatan Berdaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Dalduks KS	Dispermadesdukcapi, Dinsos, Dispora, Disdik, Dinkes.

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan di 35 Kab/Kota	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD	Dispermadesdukcapi, Dinsos, Dispora, Disdik, Dinkes, RS Provinsi, Disnakertrans
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan yang Memerlukan Perlindungan Khusus di 35 Kab/Kota	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	UPTD	Dispermadesdukcapi, Dinsos, Dispora, Disdik, Dinkes, RS Provinsi, Disnakertrans
2	Taruna karya mandiri melalui program kartu milenial untuk membuka lapangan kerja	PPEP	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan dalam bidang ekonomi pada kelompok perempuan rentan yang tersebar di 3 lokasi dengan masing-masing lokasi sebanyak 20 orang	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	KGPP	Bappeda, Dispermadesdukcapi, Dispora, Disparbud, Disperindag, Dinkop UKM, Disnakertrans, Dinsos

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka pendek serta alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Apabila dalam pelaksanaannya, ketersediaan anggaran (APBD dan APBN) tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Perubahan Renstra dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran dalam RPJMD; 2) mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2026 yang perlu diatur antara lain:

1. Unit kerja internal memahami dan mendorong pencapaian target-target dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dengan sebaik-baiknya;
2. Sumber daya internal harus saling berkoordinasi dan bekerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja dapat tercapai;
3. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target

Renja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan program maupun kegiatan;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya optimal untuk meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang serta mendorong Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan;
2. Advokasi implemementasi pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan peningkatan pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai tingkat desa dan kecamatan dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta stakeholder di Kabupaten/Kota;
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan UPTD PPA bersama jejaring mitra kerja tingkat Kabupaten/Kota;
5. Optimalisasi Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di Kecamatan serta mengembangkan teknologi informasi untuk mendukung upaya tersebut;
6. Peningkatan kesertaan keluarga berencana melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta optimalisasi Kampung KB;
7. Mendorong implementasi Grand Desain Pembangunan Keluarga (GDPK) 5 pilar dan implementasi PJPk tahun 2025 – 2029 sebagai upaya mendorong peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas penduduk serta pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan anak;
8. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKA secara efektif dan berkelanjutan.



LAMPIRAN

TABEL I
IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Risiko	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Sasaran								
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya peran dalam pembangunan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	Risiko Strategis	Perempuan kurang berdaya dalam meningkatkan pendapatannya	Perempuan belum banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian	Perempuan
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih banyak terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	Risiko Strategis	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada belum menjadi pedoman stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak	Anak
3	Sasaran Strategis	Terkendalinya jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya	Menurunnya kesejahteraan keluarga dan kelompok	Masyarakat

						membatasi kelahiran dan mengatur jarak kelahiran	masyarakat rentan miskin bertambah	
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	Risiko Strategis	Faktor Ekonomi Keluarga yang tidak mampu membiayai anak ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga menikahkan anak pada usia muda menjadi salah satu jalan untuk mengurangi tanggungan keluarga	Meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga dan angka perceraian, karena belum stabilnya mental anak untuk berkeluarga	Anak, Keluarga
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/mitra/penyedia	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan Lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat	DP3AP2KB
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Risiko Operasional	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasikan	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	DP3AP2KB

		Penduduk dan Keluarga Berencana				n standar layanan yang telah ditetapkan		
Indikator Program								
1	Sasaran Program	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	Risiko Strategis	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	Resiko Strategis	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjadi wirausaha	Perempuan dan Keluarga
2	Sasaran Program	Program Perlindungan Perempuan	Persentase UPTD PPA kab/kota sesuai standart layanan	Masih ada Pemerintah Kab/kota yang kurang berkomitmen dalam membentuk UPTD	Risiko Operasional	Belum semua isu terkait perlindungan perempuan menjadi prioritas di Kab/kota	Belum semua Kab/kota memiliki UPTD PPA	
3	Sasaran Program	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	Kabupaten/Kota tidak memiliki Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga	Resiko Operasional	Kurangnya komitmen terkait pentingnya Kebijakan Ketahanan	Kurangnya program/kegiatan yang memfokuskan pada Ketahanan Keluarga	Keluarga dan masyarakat

						Keluarga di Kabupaten/Kota		
4	Sasaran Program	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	Risiko Kemitraan	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target	
5	Sasaran Program	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan	Anak korban kekerasan
6	Sasaran Program	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pemda yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	Komitmen Tim Penyusun GDPK Kab/kota masih rendah	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman Tim Penyusunan GDPK Kab/Kota dalam menyusun dokumen GDPK	GDPK belum terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan daerah	Pemerintah Daerah
7	Sasaran Program	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran kelompok kegiatan Kampung KB	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen pemerintah desa dan pemahaman masyarakat terkait implementasi kampung kb yang mandiri dan berkelanjutan	Kampung KB belum mampu mendorong peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Desa/ Kelurahan, OPD KB Kab/Kota dan Prov

8	Sasaran Program	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	Risiko Operasional	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak	Peserta KB, Pasangan Usia Subur
9	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan tingkat ketercapaian kinerja kurang dari target	Risiko Operasional	Target Indikator yang terlalu tinggi	Capaian Kinerja OPD tidak memuaskan	OPD PPA DaldukKB
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masyarakat Tidak Puas terhadap Pelayanan OPD	Risiko Operasional	Belum semua penyelenggara layanan mengimplementasikan standar layanan yang telah ditetapkan	Persentase tingkat kepuasan pengguna layanan menurun	OPD PPA DaldukKB
Indikator Kegiatan								
1	Sasaran Kegiatan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	Risiko Operasional	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target	OPD Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada	Persentase perempuan yang mendapat fasilitas pengembangan	Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	Risiko Operasional	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkatkan pemahamannya	Perempuan

		Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	kapasitas meningkat pemahamannya					
3	Sasaran Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	Risiko Kemitraan	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan	Perempuan
4	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan yang terstandarisasi	Masih ada lembaga penyedia layanan yang belum menerapkan mekanisme layanan dan perlindungan perempuan sesuai standar	Risiko Operasional	kurangnya sinergitas dan pengawasan antar lembaga penyedia layanan (pemerintah/non pemerintah) terkait upaya perlindungan perempuan	Korban kekerasan tidak terpenuhi hak-haknya	Korban Kekerasan Perempuan
5	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap perempuan tidak lengkap	Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Perempuan korban kekerasan belum percaya sepenuhnya ke pendamping - Pendamping di Kab/Kota dalam melakukan asesmen belum lengkap tapi sudah langsung merujuk kasus ke Provinsi 	Layanan yang diberikan tidak optimal	Perempuan korban kekerasan

6	Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase kab/kota yang mendapat pendampingan intensif terkait kebijakan pembangunan ketahanan keluarga	Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Kab/kota berjalan lambat dan kurang optimal sehingga program-program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota kurang mendapatkan prioritas dukungan	Risiko Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambil kebijakan di masing-masing kab/kota belum memiliki perspektif yang sama tentang pentingnya menyusun kebijakan terkait pembangunan ketahanan keluarga di daerahnya masing-masing. - koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga masyarakat kurang efektif dan kolaborasi yang kurang solid dalam pelaksanaan program-program pembangunan keluarga 	kualitas keluarga di kab/kota kurang tercapai berdasarkan Indeks Kualitas Keluarga	Keluarga
			Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	Terdapat layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling tidak terselenggara sesuai standar di kab/kota	Risiko Operasioal	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan kebijakan pimpinan daerah yang kurang memprioritaskan ketersediaan Layanan Keluarga sebagai bagian dari 	Layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling yang responsif gender dan anak tidak tersedia secara merata di seluruh kab/kota di Jawa Tengah	Keluarga

						program pembangunan kualitas keluarga di kab/kota - keterbatasan kemampuan kab/kota dalam menyediakan sumber daya yang mendukung terselenggaranya layanan keluarga		
7	Sasaran Kegiatan	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota dengan predikat KLA minimal Madya	Pemahaman Gugus Tugas KLA terhadap indikator penilaian kurang optimal	Risiko Strategis	Kurangnya komitmen Gugus Tugas KLA	Masih terdapat kab/kota yang tidak mendapat KLA minimal Madya	OPD PPA Kab/Kota
8	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan pemenuhan hak anak yang mendapatkan KIE layanan ramah anak	Lembaga masyarakat dan Dunia Usaha belum sepenuhnya bersinergi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Risiko Operasional	kurangnya Kerjasama antara pemerintah daerah dengan Lembaga masyarakat dan dunia usaha	Lembaga masyarakat dan dunia usaha kurang berperan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Anak
9	Sasaran Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan anak	belum semua kecamatan di kabupaten/kota yang mendukung terbentuknya rumah perlindungan anak	Risiko operasional	Rumah perlindungan anak merupakan kebijakan/program baru sehingga belum ada kesiapan dan kemampuan dalam penyediaan sumber	implementasi pencegahan kekerasan terhadap anak di kecamatan kurang optimal	Anak

						daya di tiap kecamatan		
10	Sasaran Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang telah difasilitasi pengembangannya	AMPK tidak mendapatkan layanan secara terpadu	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antar penyedia layanan Kurangnya kompetensi SDM Penyedia Layanan dalam memberikan pelayanan yang terpadu	AMPK tidak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya	AMPK
11	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap anak tidak lengkap	Risiko Operasional	'- Anak korban kekerasan belum percaya sepenuhnya ke pendamping '- Pendamping di Kab/Kota dalam melakukan asesmen belum lengkap tapi sudah langsung merujuk kasus ke Provinsi '- Terlapor kasus hak asuh anak kurang proaktif dalam bekerja sama untuk menyelesaikan masalah	Layanan yang diberikan tidak optimal	Anak korban kekerasan

12	Sasaran Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	Pembangunan 5 pilar kependudukan belum dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman pemerintah daerah terhadap dokumen GDPK	timbulnya permasalahan kependudukan di daerah	OPD Provinsi/Kab /Kota
13	Sasaran Kegiatan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen profil pembangunan kependudukan.	belum tersedianya data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak	kurang optimalnya kualitas dan efektivitas dokumen yang dihasilkan	OPD Provinsi
14	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	Risiko Operasional	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak keterbatasan anggaran	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB	Anak

							rendahnya pemahaman remaja mengenai risiko kehamilan di usia anak	
15	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok UPPKA yang aktif	Tidak ada pendampingan bagi kelompok UPPKA sehingga kelompok menjadi vacum atau tidak aktif	Risiko Operasional	Kurangnya komitmen dari OPD KB atau OPD terkait dalam pendampingan kelompok	Kelompok UPPKA menjadi vacum atau tidak aktif	Kelompok UPPKA
			Persentase kelompok tribina yang aktif	Belum meratanya pengetahuan kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia. Tidak tersampainya materi kepada anggota kelompok atau sasaran keluarga balita, remaja dan lansia	Risiko Operasional	Belum semua kader mengikuti pelatihan pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia. Ketidaktifan anggota kelompok Tribina dan sasaran keluarga balita, remaja dan lansia tidak masuk dalam keanggotaan kelompok	kapasitas kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia masih rendah. keluarga balita, remaja dan lansia tidak materi tentang pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia	Kelompok, anggota dan sasaran Tribina

16	Sasaran Kegiatan	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	Risiko Operasional	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk	PUS
17	Sasaran Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Unmetneed KB	Kehamilan yang tidak diinginkan	Risiko operasional	Norma sosial dan budaya , seperti tekanan dari pasangan atau keluarga untuk tidak menggunakan kontrasepsi. Kurangnya akses terhadap layanan kontrasepsi , baik karena lokasi geografis, biaya.	Beban sosial dan ekonomi keluarga karena kehamilan yang tidak direncanakan	PUS
18	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	Risiko Fraud	Dorongan mencari keuntungan pribadi/kelompok (gratifikasi atau penggelapan)	Pegawai atau pihak terkait bisa dikenai tuntutan pidana korupsi, sanksi administrative, maupun pengembalian kerugian negara	DP3AP2KB

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	3	4	12	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) - Sosialisasi Implementasi Serat Kartini - Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan 	Memadai	2	3	6
Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	4	4	16	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak - Pelaksanaan FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak - Pelatihan Kader PATBM 	Memadai	3	3	9

Peningkatan jumlah kelahiran PUS yang signifikan	3	3	9	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan KIE terkait manfaat KB bagi masyarakat - Kespro bagi remaja dan catin - Optimalisasi RPPA di Kecamatan Berdaya 	Memadai	2	2	4
Meningkatnya angka kasus Perkawinan Anak	2	4	8	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye Jo Kawin Bocah - Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting - Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah dalam rangka Penurunan Angka Stunting dan AKI pada Kelompok PIK Remaja di Kampung KB - Optimalisasi Peningkatan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak 	Memadai	2	3	6
Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	3	4	12	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD - Pengawasan proses pengadaan barang/jasa 	Memadai	2	2	4
Capaian kinerja tingkat pelayanan umum kepegawaian dan keuangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan	2	2	4	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Pelayanan Informasi 	Memadai	1	2	2

Indikator Program									
Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	3	4	12	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rakor Pokja PUG Kabupaten/Kota/Provinsi 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Konsultasi PUG 4. Penguatan PUG bagi Kabupaten/Kota 5. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix 	Memadai	2	3	6
Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	4	3	12	Ada	Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dengan 5 tahap	Memadai	3	2	6
Masih ada Pemerintah Kab/kota yang kurang berkomitmen dalam membentuk UPTD	2	4	8	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 2. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan 	Memadai	-	-	-
Kabupaten/Kota tidak memiliki Kebijakan terkait Ketahanan Keluarga	3	3	9	Tidak					
Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	4	3	12	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak 2. Koordinasi Implementasi Pemenuhan Hak Anak 	Memadai	2	3	6

					3. Fasilitasi dan Koordinasi Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak Jawa Tengah				
Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	3	4	12	ada	1. Pelaksanaan FGD Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak 2. Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 3. Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Memadai	3	3	9
Komitmen Tim Penyusun GDPK Kab/kota masih rendah	2	4	8	Ada	Advokasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar	Memadai	2	3	6
Kurangnya komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran kelompok kegiatan Kampung KB	2	4	8	Ada	Advokasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Memadai	2	3	6
Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	3	4	12	Ada	1. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 2. Percepatan Penurunan Stunting 3. Pengembangan Konten Media KIE	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan Tingkat ketercapaian kinerja kurang dari target	3	3	9	Ada	1. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan 2. Konsultasi keterpaduan pusat dan daerah	Memadai	3	2	6

					3. Rapat Koordinasi Urusan PPPA dan Dalduk KB				
Masyarakat Tidak puas terhadap pelayanan OPD	2	2	4	Ada	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Pelayanan Informasi 3. SOP Pelayanan Bantuan Korban Kekerasan	Memadai	2	2	4
Indikator Kegiatan									
Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	4	4	16	Ada	1. Rakor POKJA PUG OPD Provinsi 2. Workshop PUG OPD Provinsi 3. Konsultasi PUG 4. Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Sinergitas Pentahelix	Belum Memadai	4	3	12
Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	4	3	12	Ada	1. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) 2. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Jawa Tengah 3. Pengembangan UMKM Perempuan Berdaya Melalui Program Inkubasi 4. Sosialisasi Implementasi Serat Kartini	Memadai	3	3	9
Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	4	4	16	Ada	1. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Rangka Pencegahan KtP dan TPPO	Belum Memadai	4	3	12

					<ul style="list-style-type: none"> 2. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO 3. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 4. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan 5. TOT Fasilitator Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota 6. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan 				
Masih ada lembaga penyedia layanan yang belum menerapkan mekanisme layanan dan perlindungan perempuan sesuai standar	3	3	9	Ada	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Workshop penguatan kelembagaan penyedia layanan di Kab/Kota 2. Kegiatan Rapat Pertemuan penguatan kelembagaan bersama lembaga penyedia layanan 	Memadai	2	3	6
Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap perempuan tidak lengkap	2	3	6	Ada	<ul style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah 	Memadai	2	2	4

					Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 4. layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 5. layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi 6. layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi				
Penyusunan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Kab/kota berjalan lambat dan kurang optimal sehingga program-program pembangunan	3	3	9	Ada	1. edukasi dan sosialisasi peningkatan ketahanan keluarga di kab/kota	Memadai	3	2	6

kualitas keluarga di kab/kota kurang mendapatkan prioritas dukungan					2. pendampingan implementasi kebijakan ketahanan keluarga di kab/kota				
Terdapat layanan keluarga yang meliputi edukasi, konsultasi dan konseling tidak terselenggara sesuai standar di kab/kota	3	3	9	Ada	1. edukasi dan sosialisasi peningkatan ketahanan keluarga di kab/kota 2. pendampingan implementasi kebijakan ketahanan keluarga di kab/kota	Memadai	2	2	4
Pemahaman Gugus Tugas KLA terhadap indikator penilaian kurang optimal	2	4	8	Ada	1. Bersurat kepada kepala daerah kab/kota terkait penilaian KLA 2. Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi KLA tingkat Provinsi	Memadai	2	3	6
Lembaga masyarakat dan Dunia Usaha belum sepenuhnya bersinergi dalam peningkatan kualitas hidup anak	4	2	8	Ada	Fasilitasi dan Koordinasi Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak Jawa Tengah	Memadai	3	2	6
belum semua kecamatan di kabupaten/kota yang mendukung terbentuknya rumah perlindungan anak	3	3	9	Ada	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK	Memadai	2	3	6
AMPK tidak mendapatkan layanan secara terpadu	2	3	6	Ada	1. Pelaksanaan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK 2. FGD penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan AMPK 3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK	Memadai	2	2	4

Data asesmen kasus rujukan kekerasan terhadap anak tidak lengkap	2	3	6	Ada	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Memadai	2	2	4
Pembangunan 5 pilar kependudukan belum dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah	2	4	8	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2. Advokasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak 3. Advokasi Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar 4. Advokasi Pendidikan Kependudukan dalam Rangka Sosialisasi Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting 5. Sosialisasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak 	Memadai	2	3	6
belum tersedianya data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen	2	4	8	Ada	Advokasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU)	Memadai	2	3	6

Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	4	3	12	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB 2. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui Kelompok BKR 3. Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok BK 4. Sosialisasi JKB melalui kelompok PIK remaja (buktikan dengan notulensi dll) 	Memadai	3	3	9
Tidak ada pendampingan bagi kelompok UPPKA sehingga kelompok menjadi vacum atau tidak aktif	3	3	9	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Kelompok UPPKA 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA 	Memadai	2	3	6
Belum meratanya pengetahuan kader dalam pendampingan keluarga balita, remaja dan lansia serta Tidak tersampainya materi kepada anggota kelompok atau sasaran keluarga balita, remaja dan lansia	3	3	9	Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting Melalui Kelompok BKB 2. Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui Kelompok BKR 3. Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Kelompok BKL 4. Sosialisasi Kegiatan Tribina dan UPPKA dalam Upaya Penurunan Angka Stunting di Jawa Tengah 	Memadai	2	3	6

					5. FGD Penyelenggaraan Kegiatan Tribina dan UPPKA di Jawa Tengah (Dalam Daerah)				
Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	4	3	12	Ada	1. Safari Pelayanan KB MKJP 2. Pengembangan Konten Media KIE 3. Penggerakan KB Pria Bersama Mitra 4. Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan	Memadai	3	3	9
Kehamilan yang tidak diinginkan	3	3	9	Ada	1. Advokasi Peningkatan Kesertaan KB Perusahaan 2. Pengembangan Konten Media KIE 3. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP	Memadai	2	3	6
Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	2	5	10	Ada	1. Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD 2. Pengawasan proses pengadaan barang/jasa	Memadai	2	2	4

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Indikator Sasaran				
Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kepala Dinas	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan
Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Kepala Dinas	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada belum terimplementasikan optimal oleh stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak
Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	12	Sekretaris	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Indikator Program				
Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	12	Kepala Bidang KGPP	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender
Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	12	Kepala Bidang KGPP	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjdai wirausaha
Belum terdapat renaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	12	Kepala Bidang PHPA	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target
Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	12	Kepala UPTD PPA	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan
Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	12	Kepala Bidang KBKIE	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak
Indikator Kegiatan				
Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	16	Kepala Bidang KGPP	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target
Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	12	Kepala Bidang KGPP	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya

Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	16	Kepala Bidang KGPP	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan
Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	12	Kepala Bidang Daldukds	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB
Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	12	Kepala Bidang KBKIE	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	10	Sekretaris	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Perempuan tidak meningkat kesejahteraannya	12	Kapasitas dan ketrampilan perempuan masih rendah	Perempuan belum banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga. Pihak Yang terkena Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender - Optimalisasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak - Sinergi antar OPD dalam Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dalam pelatihan, produksi termasuk kemudahan akses modal 	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025

Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak	Kekerasan Anak masih terjadi di dalam keluarga dan masyarakat	16	Regulasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang sudah ada tetapi belum terimplementasikan optimal oleh stakeholder terkait	Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap anak. Pihak yang terkena Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Regulasi Pencegahan Anak secara komprehensif - Advokasi Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pelayanan Kekerasan terhadap Anak di Kab/kota - Kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan dan keluarga dalam upaya mendukung lingkungan yang kondusif 	Kepala Dinas	Semester 2 Tahun 2025
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Indeks Manajemen Risiko	Pegawai Pejabat Pengadaan Barang Jasa menerima gratifikasi dari masyarakat/Mitra/Penyedia	12	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi di tingkat OPD <p>Pengawasan proses pengadaan barang/jasa</p>	Sekretaris	Semester 2 Tahun 2025

Program								
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	Hasil Rekomendasi Pengawasan APIP belum signifikan memperbaiki kinerja PUG di OPD	12	Kurang optimalnya kinerja APIP dalam melakukan pengawasan PUG di OPD	Pembangunan Daerah belum berorientasi pada isu gender	Pembahasan kinerja APIP dalam pengawasan PUG pada rapat internal Pokja PUG Provinsi	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	Pemkab dan Pemdes belum memfasilitasi dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan (misal pemasaran dan perijinan)	12	Kurangnya komitmen Pemkab dan Pemdes	Perempuan yang difasilitasi pelatihan tidak menjadi wirausaha	3.Melakukan Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengintervensi permasalahan dalam pemberdayaan perempuan 4.Melakukan koordinasi dengan kab/kota dan pemdes dalam pemberdayaan perempuan untuk berwirausaha	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Belum terdapat reaksi pemenuhan hak anak di Kab/kota	12	Belum ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas KLA	IPHA tidak mencapai target	Pendampingan dan monitoring ke Kab/kota (data dukung dilampirkan)	Kepala Bidang PHPA	Semester II Tahun 2026
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Meningkatnya jumlah anak korban kekerasan	12	Kurangnya komitmen dari pemangku kebijakan dalam	Tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan	4.Pelaksanaan FGD Penyusunan	Kepala UPTD PPA	Semester II Tahun 2026

				upaya pencegahan kekerasan terhadap anak		Kebijakan Perlindungan Anak 5. Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 6. Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Kehamilan yang tidak diinginkan meningkat yang berisiko stunting	12	Kurangnya Advokasi sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan KB Modern	Menurunnya Kualitas hidup ibu dan anak	4. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan KB MKJP 5. Percepatan Penurunan Stunting 6. Pengembangan Konten Media KIE	Kepala Bidang KBKIE	Semester II Tahun 2026
Kegiatan								
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Nilai Evaluasi PUG Provinsi	Komitmen yang kurang dalam mengidentifikasi ARG	16	Pergantian personil yang menangani ARG sering terjadi	Nilai Evaluasi PUG tidak mencapai target	Mendorong OPD untuk memberdayakan focal point PUG	Kepala Bidang KGPP	Semester II Tahun 2026
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas meningkat pemahamannya	Peserta tidak memahami Materi yang disampaikan	12	Metode penyampaian materi kurang tepat	Peserta tidak meningkat pemahamannya	Mengganti metode sosialisasi dalam bentuk brainstorming	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang mempunyai rumah perlindungan perempuan	Belum semua Kab/kota mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah perlindungan di setiap kecamatan	16	Kebijakan masih baru sehingga belum ada kesiapan sumber daya di kecamatan	Kecamatan belum mempunyai Rumah Perlindungan Perempuan	Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani di level kecamatan	Kepala Bidang KGPP	Semester I Tahun 2026
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate) 15 - 19 tahun	Cakupan kegiatan pemberdayaan belum menjangkau keseluruhan kelompok PIK Remaja	12	kurangnya kesadaran orangtua, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi Pengawasan/kontrol orangtua atau keluarga terhadap pergaulan anak	Peningkatan angka prevalensi stunting , AKI dan AKB	Koordinasi dengan OPD KB Kab/Kota untuk melakukan advokasi kepada semua PIK Remaja di Kab/Kota	Kepala Bidang Daldukds	Semester I Tahun 2026
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi MKJP sehingga meningkatnya drop out KB	12	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait KB MKJP	Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk	Safari Pelayanan KB MKJP	Kepala Bidang KBKIE	Semester I Tahun 2026
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Manipulasi bukti pembayaran, kuitansi, atau dokumen pendukung	10	Kurangnya pengawasan dan evaluasi OPD	Gratifikasi dapat merusak integritas pegawai dan lembaga, sehingga menimbulkan	Sosialisasi Anti dan anti Korupsi kampanye Gratifikasi	Sekretaris	Semester I Tahun 2026

					ketidakpercayaan masyarakat.			
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--